

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada dan konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur.**

Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku yang paling timur, dimana kabupaten ini memiliki enam kecamatan. Yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Tutuk Tolo, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate (Wikepedia, 2013). Diantara enam kecamatan yang ada ini merupakan kecamatan-kecamatan yang sistem adatnya masih sangat kental sekali. Stratifikasi sosialnya masih sangat terlihat jelas dimana, perbedaan kasta masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat atau secara universal maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki negeri raja-raja. Kehidupan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini betul-betul dijaga. Artinya bahwa solidaritas sosial yang ada pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut betul-betul terjaga dan sangat dipelihara.

Tetapi semenjak bergulirnya pesta rakyat (PILKADA) Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditunjuk langsung oleh rakyat itu pertama kali di gelar pada Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu pada tahun 2005

(2005-2010 adalah periode pertama) solidaritas sosial mulai hancur. Pada saat itu kandidat yang mengikuti kompetisi akbar tersebut terdiri dari tiga pasangan calon dan yang menang dalam kompetisi tersebut adalah pasangan Abdullah Vanath dan Siti Umariah Suruwaky dengan perolehan suara sebanyak 33.170 suara atau 58 persen dari total jumlah pemilih sebanyak 77.942 orang (Antar Maluku, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, masyarakat menyatakan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi hancurnya solidaritas sosial di Kecamatan Bula ialah rendahnya tingkat sosialisasi masyarakat terkait pemilihan kepala daerah. Minimnya tingkat sosialisasi menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilihan yang bersih pun cenderung rendah. Hal tersebut memicu kejadian curang yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan adu mulut antara pendukung satu dengan pendukung yang lain. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut pengetahuan saya alasan utama terjadinya konflik Pilkada yang berujung kekerasan di kota Bula adalah kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pemilu sehingga masyarakat atau kelompok – kelompok tertentu berlaku curang demi memenangkan pasangan kandidat yang mereka dukung” (Wawancara dengan Alimudin Kelrey Selaku Masyarakat tanggal 2 November 2017)

Keretakan solidaritas sosial di Kecamatan Bula pada waktu itu belum terlalu parah. Artinya di lingkungan sosial Kecamatan Bula hanya terjadi miskomunikasi (tidak saling tegur) dan perkelahian antara sesama

saja. Hal tersebut terjadi berkaitan dengan keegoisan masyarakat yang tidak siap menerima kekalahan calon pimpinan sehingga mereka yang kalah cenderung menyerang calon pemimpin yang memenangkan pilkada dengan mengeluarkan aib dari pasangan tersebut yang pada akhirnya hal tersebut menimbulkan rasa tidak terima bagi pendukung dari pasangan yang pada akhirnya berujung pada perkelahian antar sesama. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Dikota Bula masih menggunakan / memakai sistem kekeluargaan ketika pemimpin yang mereka dukung tidak memenangkan pilkada maka mereka akan menyerang calon pemimpin yang memenangkan pilkada dengan cara mengeluarkan aib pasangan tersebut sehingga pendukung dari pasangan itu tidak terima dan terjadi konflik.” (Wawancara dengan Abdul Rahman Selaku Tokoh Masyarakat tanggal 17 November 2017)

Selain bersumber dari masyarakat, adanya konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram juga disebabkan dari pihak calon pemimpin sendiri. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa calon pemimpin yang tidak siap menerima kekalahan menarik perhatian masyarakat dengan cara memberikan imbalan. Sehingga masyarakat lebih memihak pada pemimpin yang memberi imbalan meskipun menimbulkan kerusuhan dan kekerasan antar sesama, sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya massa gampang dikerahkan dengan sedikit imbalan. Penyelesaian sengketa pilkada yang berlarut – larut. Perseteruan antara pada pendukung bakal calon bupati yang satu dengan yang lain, sehingga belum siap untuk menghadapi kekalahan dan berujung rusuh dan menimbulkan kekerasan”. (Wawancara dengan Elma Aprilia Selaku Masyarakat tanggal 2 November 2017)

Keterlibatan masyarakat dalam pilkada sangat penting, karena suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara dan peserta saja, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat demi terciptanya sinergitas yang kuat untuk kelangsungan pilkada yang baik. Pada dasarnya masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Pilkada yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Kota Bula Seram. Bahkan pada awal perjalanan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, namun adanya perhitungan suara yang dinilai tidak adil oleh masyarakat sehingga memicu terjadinya konflik pada masyarakat yang tidak menerima kekalahan dengan saling sindir dan saling maki antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

“Yang saya lihat masyarakat sangat antusias mengikuti Pilkada, meskipun terlihat jelas akan kemarahan pada pemilih yang lain yang berbeda pendapat. Awalnya semua berjalan dengan baik namun setelah penghitungan suara berjalan masyarakat antar kelompok dengan kelompok yang lain saling sindir, memaki satu sama lain. Konflik yang terjadi akibat tidak adanya kepuasan dalam diri bahwa yang menang biarlah menang dan yang kalah akan terus belajar dan mau menerima kekalahan tersebut”. (Wawancara dengan Abdul Rahman Selaku Tokoh Masyarakat tanggal 17 November 2017)

Didukung wawancara dengan Sri Safrida yang menyatakan hal yang sama, dalam wawancara sebagai berikut:

“Awalnya masyarakat mengikuti pemilihan dengan aman, namun setelah penghitungan suara keluar masyarakat yang tidak terima akan kekalahannya mulai memanipulasi keadaan sehingga menimbulkan kemarahan pihak lain. Saling sindir dan tidak mampu mengendalikan diri, hal ini pun masih terjadi hingga sekarang”. (Wawancara dengan Sri Safrida Selaku Masyarakat tanggal 5 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat telah melibatkan diri dengan mengikuti kegiatan pilkada maupun kampanye yang dilakukan antar kelompok. Namun adanya beberapa faktor untuk memenangkan pilkada baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari calon pemimpin menimbulkan beberapa konflik yang menciptakan kesalahfahaman dan adu mulut yang pada akhirnya berujung pada kekerasan antar kelompok.

## **2. Penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.**

Bulan 24 Juni 2005 masyarakat Seram Bagian Timur melakukan Pilkada yang pertama kalinya untuk periode 2005 – 2010. Pada pemilihan yang dilaksanakan terdapat konflik di Kecamatan Bula. Pada tanggal 25 Juni 2005 meskipun penghitungan suara belum selesai, terdapat beberapa pendukung kepala daerah Seram Bagian Timur melakukan konvoi sehingga memicu emosi pendukung calon yang kalah. Bentrokan antar warga hampir terjadi tetapi bisa dicegah setelah petugas Panwas meminta arak-arakan dihentikan (Direktorat Politik dan Komunikasi, 2005).

Bulan Juni tahun 2010 pesta rakyat yang kedua digelar untuk menentukan kepemimpinan Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2010-2015, dimana pada saat itu hanya diikuti oleh dua kandidat yaitu Mukti Keliobas dan Jusup Rumatoras versus Abdullah Vanath dan Sitti Umariah Suruwaky (incumbent). Dalam pertarungan ini pihak

incumbentlah (Dullah-Sitti) memenangkan kompetisi untuk yang kedua kalinya.

Hal tersebut melatarbelakangi keretakan hubungan kekeluargaan masyarakat Kecamatan Bula yang jauh lebih parah dari pada periode pertama. Pada periode kedua ini dikatakan sebagai perang saudara karena keretakan hubungan kekeluargaan ini terjadi amuk massa dan bentrokan antara antar kelompok dimulai sejak pagi hari di Sekretariat KPUD SBT di Bula selanjutnya massa dengan benda tajam bergerak secara membabi buta membakar Gedung DPRD SBT, Kantor Camat Bula, tiga (3) rumah warga ikut terbakar, termasuk satu unit mobil Avanza dan tiga unit motor juga dibakar. Amukan massa tersebut berlangsung hingga sore-malam hari.

Diduga kuat telah terjadi manipulasi terhadap proses dan hasil rekap penghitungan suara pemilukada. Meskipun telah melakukan penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang bermasalah, namun adanya pihak yang tidak puas dengan tindak penghitungan ulang yang dilakukan tersebut menimbulkan perlawanan dan aksi kekerasan yang membabi buta. Pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara :

“Faktor – faktor yang mempengaruhi / menjadi penyebab konflik adalah sistem kekeluargaan, apabila yang mencalonkan diri adalah keluarga atau kerabatnya meskipun tidak tau berpolitik, tidak mau menerima kekalahan dan banyak kecurangan dan memanipulasi perhitungan suara”. (Wawancara dengan Akib Arif Selaku Masyarakat tanggal 8 November 2017)

Aksi kekerasan dan amukan massa tersebut terkonsentrasi di Kota Bula, dimana dimulai dengan bentrokan antar massa pendukung, lalu

meluas aksinya ke pembakaran gedung DPRD, Kantor Camat Bula, beberapa rumah warga tepatnya 3 rumah, serta mobil dan motor ikut terbakar (Tempo, 2010). Lemahnya pengawasan dari petugas yang memantau situasi dilapangan saat pilkada dilaksanakan merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi kejadian tersebut. Pengawasan yang kurang optimal tersebut mengakibatkan terjadinya tindak manipulasi hasil suara yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Sesuai hasil wawancara:

“Faktor yang menjadi penyebab konflik seperti janji – janji yang tidak ditepati, tidak menerima kekalahan oleh para kandidat dan tim suksesnya, dan kurang adanya pengawasan dari yang bertugas memantau situasi dilapangan saat pilkada dilaksanakan”. (Wawancara dengan Sri Safrida Selaku Masyarakat tanggal 5 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara memberikan gambaran bahwa penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dipicu oleh kurangnya pengawasan dari petugas dilapangan pada saat pilkada dilaksanakan sehingga menimbulkan kecurangan dan manipulasi suara yang mengakibatkan kericuhan dan aksi berontak pada masyarakat yang tidak mau menerima kekalahan.

### **3. Peran, perilaku politik masyarakat dan solusi terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.**

Pemilihan umum merupakan mekanisme politik untuk mengganti kepemimpinan yang di ikhtiarkan menyegarkan kembali moralitas dan

komitmen kerakyatan. Pemilu juga merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Bentuk partisipasi masyarakat di Kecamatan Bula Kabupaten Seram sudah berjalan dengan baik ditandai dengan tingkat partisipan masyarakat yang cukup tinggi dalam menciptakan kelompok untuk mendukung calon pemimpin dan melakukan kampanye untuk mengenalkan calon pemimpin kepada masyarakat secara lebih luas.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sudah memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam kampanye, diskusi politik hanya saja semua yang sudah dilakukan tidak berjalan baik jika masyarakat tidak mau menerima kekalahan”. (Wawancara dengan Alimudin Kelrey Selaku Masyarakat tanggal 2 November 2017)

Didukung hasil wawancara dengan pegawai komisi pemilihan umum daerah sebagai berikut:

“Peran dan perilaku politik masyarakat menghadapi konflik, kalau bicara perilaku politik berarti bicara mengenai tindakan masyarakat terkait politik dan perilaku politik masyarakat SBT bisa di bilang sama imbangnya artinya ada yang mengerti politik dan ada juga yang belum paham, dan tindakan mereka menghadapi pilkada dan konflik yaitu sama2 ikut terlibat dalam kedua hal tersebut” “. (Wawancara dengan Saida Waraiya, SE Selaku pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah tanggal 5 November 2017).

Peran aktif masyarakat yang begitu banyak dengan persepsi pemikiran masing-masing dikuatkan dengan adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memegang kendali atas politik berkumpul bersama mengikuti pilkada dengan masyarakat sehingga memicu terjadinya konflik yang berujung pada kekerasan. Jika peran masyarakat

tersebut disatukan dalam bentuk kegiatan sosial bersama maka dapat meminimalisasikan terjadinya konflik yang berujung pada kekerasan.

“Adanya pesta rakyat atau makan patita (makan bersama / adat) semua dari kampung – kampung yang bersitegang dan luar daerah akan diundang ketika mereka datang dan berbaur maka mereka memutuskan untuk berdamai dan mau menerima kekalahan” (Wawancara dengan Abdul Rahman Selaku Tokoh Masyarakat tanggal 17 November 2017).

Pendapat tersebut didukung dengan wawancara berikut:

“Adanya pesta rakyat, makan patita untuk seluruh masyarakat dan saling silaturahmi antar kelompok – kelompok dapat menjadi solusi dalam menghadapi konflik” (Wawancara dengan Elma Aprilia Selaku Masyarakat tanggal 2 November 2017).

Selain kegiatan social, faktor lain yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi konflik ialah dengan melibatkan orang ketiga untuk membantu meminimalisir konflik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Mediasi. Dengan menghadirkan orang ketiga sebagai penengah atau yang bias meminimalisasi konflik yang terjadi” ”. (Wawancara dengan Saida Waraiya, SE Selaku pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah tanggal 5 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara memberikan gambaran tentang Peran, perilaku politik masyarakat dan solusi solusi dalam menghadapi konflik yang berujung kekerasan di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ialah dengan melakukan kegiatan sosial seperti musyawarah dan makan bersama antar kelompok untuk mempererat persaudaraan sehingga meminimalisasi kejadian kekerasan antar sesama. Namun apabila konflik masih panas solusi yang diambil ialah dengan mendatangkan pihak

ketiga yang netral sehingga dapat membantu dan mencari solusi untuk kebaikan bersama. Selain itu, untuk kedepannya perlu adanya arahan dalam setiap kegiatan pilkada seperti dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan sebelum kegiatan berlangsung. Adanya kegiatan sosialisasi dalam pemilihan pemimpin baru dapat memberikan masyarakat pandangan terkait seperti apa seharusnya pilkada itu berjalan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada dan konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur.**

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat (Mahendra, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat telah melibatkan diri dalam mengikuti kegiatan pilkada dengan memberikan hak suara, mengikuti kampanye yang dilakukan antar kelompok dan

melakukan pemungutan dan perhitungan suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan pilkada di Kota Bula Seram. Menurut Mahendra kesadaran politik yang tinggi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Jika Orientasi memilih mereka mampu melatarbelakangi dalam memberikan partisipasi politik dan cara pandang dari golongan masyarakat dalam struktur masyarakat yang melatarbelakangi orientasi politik yaitu nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat jika mampu mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Dengan kata lain, partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentunya kesadaran politik mereka juga rendah dalam konteks pemilu bahkan pemilihan Kepala Daerah.

Dalam kegiatan Pilkada, baik masyarakat pendukung maupun calon pimpinan menginginkan sebuah kemenangan berada di kubu masing-masing pihak. Sehingga mereka yang tidak siap terhadap kekalahan cenderung melakukan berbagai hal untuk meraih kemenangan meskipun menggunakan cara yang salah seperti melakukan praktik curang dengan memberi uang kepada masyarakat agar memilih mereka. Menurut Armunanto, dkk masyarakat yang masuk kedalam pemilihan bayaran akan menjadi anggota kelompok tersebut dan hanya mengikuti apa yang kelompoknya kerjakan dan tentunya mereka lebih memilih orang yang memberikan uang atau baju pada kelompoknya tersebut

(Armunanto, 2015). Karakter pemilih seperti ini juga bisa berpotensi menimbulkan konflik. Karena jika pemilih mudah dimobilisasi hanya karena bayaran maka selanjutnya pemilih juga akan lebih cenderung untuk mengikuti semua tindakan dari kelompoknya jika terjadi gesekan antar pendukung yang lain meskipun tindakan tersebut bernilai negative.

Adanya tindak kecurangan tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya konflik berupa sindiran dan caci maki antar kelompok. Selain itu adanya beberapa orang yang menjadi provokator untuk memerangi kelompok lain dengan mengeluarkan aib/ kelemahan calon pemimpin sehingga memicu amarah pendukung yang pada akhirnya menyebabkan konflik tidak bisa untuk dihindari lagi. Mahendra (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang demokratis seharusnya mampu bertindak secara proaktif dalam menjemput partisipasi masyarakat dengan hal yang positif seperti transformasi pendidikan. Dengan begitu pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang kuat kukuh, terbantu tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama masyarakat mengelola setiap kebijakan publik menjadi lebih menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kota Bula Seram Bagian Timur sudah memiliki keterlibatan yang baik dalam kegiatan pilkada, namun adanya beberapa faktor kecurangan yang dilakukan salah satu pihak calon pimpinan sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada sangat penting, karena suksesnya

pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara dan peserta saja, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat demi terciptanya sinergitas yang kuat untuk kelangsungan pilkada yang baik.

## **2. Penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.**

Kemajuan suatu daerah bergantung pada kepemimpinan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pilkada. Masyarakat dalam memberikan suara juga berharap agar pemimpi yang ia pilih saat pilkada mampu menjadi pemimpin yang dapat merubah kehidupan suatu daerah menjadi lebih baik. Firmanzah menyatakan bahwa pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara (Firmanzah, 2010)

Tidak sedikit pemimpin yang mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Namun tidak banyak pula pemimpin yang tidak bisa menjaga janji mereka setelah terpilih, sehingga menimbulkan rasa kecewa terhadap masyarakat. Bentuk kekecewaan masyarakat tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Selain banyaknya janji yang tidak ditepati pemimpin, dalam proses pelaksanaan pilkada para masyarakat pendukung dan calon pemimpin yang tidak bisa menerima kekalahan akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan pilkada, salah satunya dengan melakukan

manipulasi hasil perhitungan suara yang diketahui oleh kelompok lain. Lemahnya pengawasan dari petugas dilapangan pada saat kegiatan pilkada dilaksanakan juga diduga menjadi faktor penguat terjadinya konflik di Kecamatan Bula Kabupaten Seram.

Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal (Nasikun, 1995). Adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik seperti kesalahfahaman dan adu mulut yang pada akhirnya menimbulkan perasaan dan emosi. Pada keadaan emosi tersebut masyarakat melampiaskan kemarahannya dengan tindakan kekerasan. Wirawan menyatakan bahwa sebagian orang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional (irasional) saat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik (Wirawan, 2009).

Kegiatan pemilihan kepemimpinan Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2010-2015 yang kembali dilaksanakan pada periode kedua juga dimenangkan oleh pihak yang sama. Hal tersebut melatarbelakangi keretakan hubungan kekeluargaan masyarakat Kecamatan Bula yang jauh lebih parah dari pada periode pertama. Pada periode ini perang saudara

karena keretakan hubungan kekeluargaan tersebut kembali terjadi. Amuk massa dan bentrokan antar kelompok yang dimulai sejak pagi hingga malam hari tidak bisa dihindari lagi. Selain melakukan tindakan kekerasan dengan benda tajam para masyarakat juga merusak berbagai gedung dengan membakar gedung DPR dan juga rumah warga.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ditengarai oleh banyaknya janji yang tidak ditepati pemimpin pada masa lalu, masyarakat pendukung dan calon pemimpin yang tidak bisa menerima kekalahan sehingga melakukan tindak curang dengan melakukan manipulasi hasil perhitungan suara dan lemahnya pengawasan dari petugas dilapangan pada saat kegiatan pilkada dilaksanakan. Armunanto membenarkan bahwa pihak pengamanan dapat menjadi factor pemicu terjadinya konflik. Aparat keamanan yang melakukan pembiaran kepada masa yang membongkar kotak suara milik KPU yang berisi surat-surat suara menjadi pemicu besar terhadap terjadinya konflik dalam pilkada (Armunanto, 2015).

Adanya konflik yang menimbulkan permusuhan antar warga harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Menurut Armunanto Persoalan-persoalan yang terjadi pada kegiatan pilkada tidak mungkin terjadi apabila potensi konflik dalam Pemilihan kepala daerah secara langsung bisa dideteksi sejak awal. Sehingga pemerintah dan penyelenggara

pemilu bisa mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

3. **Peran, perilaku politik masyarakat dan solusi terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.**

Perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka bagi masyarakat. Firmanzah menyatakan bahwa kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya merupakan perilaku politik dalam memilih pimpinan (Firmanzah, 2010). Artinya, perilaku politik masyarakat merupakan peran dan bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya kepada calon pemimpin sesuai hak dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, peran dan perilaku politik di kecamatan Bula sama-sama berjalan. Masyarakat telah berperan dalam kegiatan pemilu dengan ikut terlibat pada semua kegiatan seperti kampanye dan kegiatan politik yang telah dibentuk oleh masing-masing kelompok. Meskipun mengikuti kegiatan politik namun tidak semua masyarakat mengerti dan faham seperti apa itu politik. Namun, rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat sehingga mudah dihasut oleh orang yang tidak bertanggung jawab meskipun masyarakatnya sudah mengikuti aturan perilaku politik yang diberikan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama suksesnya pilkada. Namun tingginya ego masyarakat dan rendahnya kesadaran politik memicu konflik pada kegiatan pilkada yang pada akhirnya dapat berujung pada tindak kekerasan. Karena itu perlu adanya evaluasi untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi agar kembali merekatkan tali persaudaraan antar kelompok yang telah terputus karena tindak kekerasan.

Hasil wawancara menyatakan bahwa beberapa cara yang digunakan untuk menghadapi konflik yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula ialah dengan mengadakan kegiatan/acara bersama antar kampung. Bentuk silaturahmi ini dapat digunakan untuk memperlerat tali persaudaraan dan membahas solusi terkait masalah politik yang sedang terjadi. Dimana konflik politik tidak seharusnya dibawa-bawa pada kehidupan pribadi masyarakat, terlebih adanya konflik tersebut sampai menimbulkan kekerasan dan kerusakan bangunan.

Selain silaturahmi, cara yang digunakan untuk menghadapi konflik dapat dilakukan dengan mendatangkan pihak ketiga/ mediator yang netral untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan jenis resolusi konflik alternatif yang telah dipakai untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik. Di Indonesia, mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik di berbagai masyarakat adat, keluarga atau perkawinan, konflik interpersonal,

penyelesaian konflik manajemen bisnis dan pemerintahan sampai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta konflik sosial.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran dan perilaku politik masyarakat di kecamatan Bula telah berjalan dengan baik. Tingginya ego dan rendahnya kesadaran politik masyarakat memicu konflik pada kegiatan pilkada yang pada akhirnya dapat berujung pada tindak kekerasan. Sehingga memerlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan/ pertemuan antar kampung. Selain silaturahmi, konflik yang tidak bisa ditangani oleh kedua pihak dapat dipecahkan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah yang membantu kedua pihak yang bermasalah.

Perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut dari pihak pemerintah maupun KPU untuk kegiatan pilkada yang akan datang. Adanya kegiatan sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan juga kesadaran masyarakat akan pemilihan yang lebih positif sehingga meminimalisasi terjadinya pemberontakan yang berujung pada kekerasan di Kecamatan Bula. Hal tersebut didukung oleh Panca dan Widodo yang menyatakan bahwa sosialisasi mampu memberikan pengaruh sebesar 23,9% terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu (Panca dan Widodo, 2015).